

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pemerintah di daerah mampu mengelola dan meningkatkan sendiri sumber-sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator tingkat kemandirian pemerintah daerah dari aspek keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan tiap-tiap daerah dapat mengurus kepentingan daerahnya sendiri, begitu juga dalam hal pengelolaan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu dengan memberlakukan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD khususnya bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan di daerah dapat terwujud

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Kab. Gresik) merupakan bagian yang memiliki peran penting di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam rangka memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari aspek pemasukan retribusi. Salah satu tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu melakukan pengujian pada kendaraan angkutan darat. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Seiring berkembangnya sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dalam menjalankan programnya maka berkembang pula persaingan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) antar kabupaten satu dengan yang lain, yang mengakibatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bersaing dalam mengelola program tersebut dengan baik secara keseluruhan agar mampu menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang memiliki kemampuan manajemen yang handal.

Disamping berkembangnya program dari sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) maka tidak menutup kemungkinan kesalahan atau kecurangan bisa saja terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengujian kendaraan bermotor tersebut. Baik kesalahan itu dari Sumber Daya Alam maupun dari faktor teknis. Oleh karenanya, salah satu upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mengatasi kesalahan dan kecurangan tersebut adalah dengan

menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.

Sistem pengendalian Intern merupakan salah satu upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mengendalikan seluruh kegiatan operasional yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) karena adanya sistem pengendalian Intern, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik

Berdasarkan uraian diatas dapat dimaksudkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan salah satu upaya oleh UPTD PKB Kab. Gresik merupakan salah satu langkah dan strategi yang sangat urgen untuk menjaga keuangan Negara dari tindakan-tindakan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengambil topik tentang Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Retribusi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Perhubungan Kab Gresik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Retribusi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada dinas perhubungan Kab Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Retribusi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada dinas perhubungan Kab. Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh oleh penelitian ini adalah:

- a. Bagi pihak pengujian kendaraan bermotor Kab Gresik, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai Sistem Pengendalian Intern terhadap penerimaan retribusi.
- b. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah.
- c. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

1.5. Waktu dan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan Kab Gresik yang beralamat di Jl. Lamongan Bunder Gresik. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 40 hari (6 minggu) yang dimulai tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 24 Februari 2014 dengan hari/jam kerja yang disesuaikan dengan jam kerja tempat Praktik Kerja Lapangan.